

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Warga Tidak Mampu Diguyur Subsidi Pangan Rp1 Triliun

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI guyur anggaran Rp1 triliun untuk subsidi pangan murah bagi warga ibukota tidak mampu. Dengan subsidi tersebut diharapkan akan bisa menekan angka kemiskinan di Jakarta.

\_\_\_\_\_ Peliput: John \_\_\_\_\_

“

## Upaya Menekan Angka Kemiskinan Ibukota

”

Adapun dari data di Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah warga miskin pada September 2018 berjumlah 372,26 ribu orang. Dibandingkan dengan September 2017, persentase penduduk miskin turun 0,23 persen poin atau turun sebesar 20,87 ribu orang. Untuk tahun 2019 juga berkurang sekitar 20 ribu orang.

"Ini sudah menjadi program Pemprov DKI untuk menekan angka kemiskinan selain program unggulan lain," ungkap Gubernur DKI

Jakarta, Anies Baswedan, Rabu (23/10).

Dari data, pada 2019, program Pangan Murah dianggarkan sebesar Rp1,078 triliun rupiah yang diperuntukkan 1.100.894 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018, yang hanya dialokasikan sebesar Rp885 miliar rupiah untuk 840.630 orang.

Program pangan murah tersebut diselenggarakan di toko perkulakan dan pasar-pasar yang ada di Jakarta. Tokonya buka setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.00-17.00.



Selain itu, pangan murah juga bisa diperoleh di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Sedang, pasar pangan murah rutin diadakan setiap bulan pada pukul

08.00-12.00. "Dinas juga telah menyiapkan daftar siapa saja yang berhak menerima subsidi pangan. Ini jadi program tahunan."

Mereka yang berhak menerima subsidi pangan, yakni pemegang KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta,

pemegang Kartu Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta. (ruh)